



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS**

**SKRIPSI
DESENTRALISASI FISKAL DAN KINERJA EKONOMI
SUMATERA BARAT**

Oleh

LUSIANA NURAINI

07 151 094

**Mahasiswa Program S-1
Fakultas Ekonomi Universitas Andalas**

PADANG

2011

Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Ekonomi Sumatera Barat

Skripsi S1 Oleh: Lusiana Nuraini

Pembimbing Skripsi: Drs. Zulkanaini Ras, M.Si

Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai desentralisasi fiskal dan kinerja ekonomi Sumatera Barat yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, jumlah penduduk miskin, dan kesejahteraan masyarakat. Model dibuat berdasarkan analisis *Structural Equation Model* (SEM) dimana model yang dibuat berdasarkan teori yang ada dan direpresentasikan kedalam bentuk matematis dan *path diagram* dengan menggunakan *tools AMOS* versi 5. Data yang digunakan adalah data panel dengan 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat dari tahun 2001-2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, penyerapan tenaga kerja mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, dan penurunan angka kemiskinan mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan potensi/sumber daya yang ada di wilayahnya guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga desentralisasi fiskal meningkat. Seiring dengan peningkatan desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat, sehingga terjadi penyerapan tenaga, mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Selama masa pemerintahan orde baru perekonomian Indonesia menunjukkan kondisi yang baik. Laju pertumbuhan ekonomi secara nasional rata-rata per tahun cukup tinggi dan pendapatan per kapita kian naik setiap tahunnya. Namun pergerakan ekonomi lebih terkonsentrasi di pusat (Jawa), sehingga keberhasilan ekonomi yang ditingkat nasional cenderung tidak menunjukkan kondisi riil ekonomi yang sebenarnya. Jika dilihat pada tingkat regional, kesenjangan pembangunan ekonomi antarprovinsi semakin besar. Hal ini tidak lepas dari UU No. 5 tahun 1974 dimana kekuasaan dan kontrol yang begitu besar dari pemerintah pusat dalam mengelola sumber pendapatan daerah yang ditetapkan sebagai sumber pendapatan negara, termasuk pendapatan dari hasil sumber daya alam (SDA) di sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan/kelautan. Sehingga, selama itu daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam tidak dapat menikmati hasil secara layak (Yafiz,1999).

Munculnya krisis ekonomi disusul kemudian dengan lengsernya Soeharto, timbulnya krisis politik dan sosial, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan semakin parahnya hak asasi manusia (HAM); semuanya ini seakan-akan memberikan suatu kesempatan besar bagi masyarakat di daerah yang selama pemerintahan orde baru sangat tertekan untuk menuntut kemerdekaan atau pendapatan otonomi yang lebih luas (Tambunan, 2001).

Kondisi ini memicu gerakan desintegrasi yang melahirkan dua undang-undang yang memberikan keleluasaan kepada daerah dalam wujud otonomi yang luas dan bertanggungjawab untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, tanpa ada lagi

intervensi dari pemerintah pusat, menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya. Hal ini ditunjukkan dengan dikeluarkannya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sekarang diganti menjadi UU No.32/2004 dan UU No. 25/1999 menjadi UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pengambilan keputusan yang dahulunya tergantung pemerintah pusat (sentralisasi) sekarang berubah menjadi pendelegasian wewenang kepada pemerintah daerah (desentralisasi).

Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diharapkan dapat mendorong partisipasi, prakarsa, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. Selain itu, desentralisasi fiskal dapat memperbaiki alokasi sumberdaya produktif melalui pergeseran peran dalam pengambilan keputusan publik ketingkat pemerintahan yang paling rendah yang memiliki informasi paling lengkap. Menurut UU 33 Tahun 2004 sumber penerimaan yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana bagi hasil, pinjaman daerah, dan penerimaan lain-lain yang sah.

Salah satu indikator yang digunakan dalam melihat tingkat desentralisasi fiskal ialah rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentu didorong oleh aktivitas ekonomi yang terjadi di daerah tersebut, sehingga dapat memicu akselerasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sebaiknya disertai dengan peningkatan kondisi ekonomi makro dan sosial di daerah tersebut. Oleh karena itu, terdapat beberapa

indikator untuk melihat kinerja pembangunan daerah. Pertama, dilihat dari hasil *output* pembangunan daerah yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sejak pemberlakuan desentralisasi yakni tahun 2001 – 2009 (*table 4.2*) data menunjukkan terjadi kenaikan PDRB Sumatera Barat setiap tahunnya. Peningkatan PDRB dipicu dari peningkatan aktivitas ekonomi melalui pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah tersebut.

Kedua, dilihat dari indikator sosial (tenaga kerja) di Sumatera Barat dari tahun 2001 hingga 2009, dimana angka pengangguran masih terlihat tinggi terutama dari tahun 2004-2006 (*table 4.2*). Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi belum mampu menyerap tenaga kerja secara maksimal, sehingga angka pengangguran masih terbilang tinggi.

Ketiga, ditinjau dari aspek kemiskinan di Sumatera Barat yang dilihat dari jumlah penduduk miskin. Tingginya jumlah penduduk miskin belum menunjukkan suatu keberhasilan yang cukup memuaskan. Keempat, tingkat kesejahteraan masyarakat melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Salah satu indikator kemiskinan terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) seperti pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Kondisi yang miskin menyebabkan seseorang akan mengeluarkan pendapatannya hanya untuk kebutuhan pangan atau makanan saja dan akan mengabaikan kebutuhan yang lain seperti pendidikan dan kesehatan, sehingga tidak akan merasakan kehidupan yang layak.

Idealnya, pelaksanaan desentralisasi fiskal diharapkan mampu mengatasi permasalahan ekonomi, sehingga hal tersebut memicu makin menariknya isu mengenai pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pengaruhnya terhadap kinerja ekonomi suatu daerah. Oleh karena itu, menjadi penting bagi penulis untuk mengkaji apakah melalui

desentralisasi fiskal di Sumatera Barat mampu menjawab persoalan ekonomi yang dilihat dari variabel makro dan sosial yakni pertumbuhan ekonomi; kemiskinan; tenaga kerja terserap; dan kesejahteraan masyarakat, sehingga adapun judul yang diambil adalah

“DESENTRALISASI FISKAL DAN KINERJA EKONOMI SUMATERA BARAT”

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini akan mengkaji mengenai bagaimana peranan desentralisasi fiskal terhadap kinerja ekonomi makro Sumatera Barat dari tahun 2001 (setelah pergantian UU tahun 2001) hingga 2009. Berangkat dari persoalan tersebut maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

“Bagaimana peranan desentralisasi fiskal terhadap kinerja ekonomi Sumatera Barat yang dilihat dari Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Penyerapan Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan masyarakat? “

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menganalisis bagaimana desentralisasi fiskal dan kinerja ekonomi Sumatera Barat yang dilihat dari Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil studi dan pembahasan tentang desentralisasi fiskal dan kinerja ekonomi Sumatera Barat maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Desentralisasi fiskal mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien jalur antara desentralisasi dan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,110 dan probabilitas sebesar 0,002(signifikan pada $\alpha = 1\%$). Peningkatan 1% derajat desentralisasi fiskal akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,11% dan pengaruh tersebut signifikan.
2. Pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja memiliki hubungan yang positif dan signifikan. Hasil estimasi yang menunjukkan bahwa koefisien jalur bernilai positif yaitu sebesar 1,359 dan probabilitas sebesar 0,007 dengan tingkat signifikansi 1%. Hal ini menyatakan bahwa peningkatan 1 % pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan 1,359% tingkat partisipasi angkatan kerja, yang berarti bahwa meningkatnya penduduk usia kerja yang memasuki pasar kerja.
3. Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Koefisien jalur kedua variabel ini bernilai negatif yaitu -8,782 dan probabilitas sebesar 0,007 (signifikan pada $\alpha = 1\%$). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% akan

menurunkan *Head Count Index* sebesar 8,782 yang berarti bahwa persentasi penduduk miskin yang berada dibawah garis kemiskinan mengalami penurunan.

4. Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat memiliki hubungan yang positif dan signifikan. Koefisien jalur yang bernilai positif sebesar 1,177 dan probabilitas sebesar 0,000 (signifikan pada $\alpha=1\%$). Hal ini mengartikan bahwa setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% akan meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 1,177. Peningkatan IPM ini. menunjukkan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
5. Penyerapan tenaga kerja mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dengan kesejahteraan masyarakat. Koefisien jalur sebesar 0,113 menunjukkan bahwa meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang diprosi dengan TPAK sebesar 1% akan meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 0,113 yang berarti kesejahteraan masyarakat juga meningkat dan signifikan pada probabilitas 0,007 pada taraf kepercayaan 1%.
6. Jumlah penduduk miskin yang mempunyai hubungan negatif dengan kesejahteraan masyarakat dengan koefisien jalur sebesar -0,692. Hasil estimasi ini menjelaskan bahwa penurunan jumlah penduduk miskin yakni yang diprosi melalui *Head Count Index* (HCI) sebesar 1% akan meningkatkan kesejateaan masyarakat sebesar 0,692, dalam hal ini adalah indeks pembangunan manusia (IPM)

DAFTAR PUSTAKA

- Arini, Septia. 2010. *Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Barat*. Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- Bahl, Roy W. 2000. "China: Evaluating the Impact of Intergovernmental Fiscal Reform," *Fiscal Decentralization in Developing Countries*. Richard M. Bird and Francois Vaillancourt. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Barzelay, M. 1991 "Managing Local Development, Lesson from Spain," *Policy Sciences*, hal. 24, 271 – 290.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Keuangan Kabupaten/Kota di Indonesia 2001 - 2009*. Jakarta : BPS
- Badan Pusat Statistik. Ringkasan Esekutif Ketenagakerjaan tahun 2001 – 2002 . Sumatera Barat: BPS
- Badan Pusat Statistik. Sumatera Barat dalam Angka tahun 2001 – 2002 . Sumatera Barat: BPS
- _____. *Statistik Indonesia 2004*. Jakarta : BPS, 2007.
- _____. *Statistik Indonesia 2005*. Jakarta : BPS, 2007.
- _____. *Statistik Indonesia 2006*. Jakarta : BPS, 2007.
- _____. *Statistik Indonesia 2007*. Jakarta : BPS, 2008.
- _____. *Statistik Indonesia 2008*. Jakarta : BPS, 2009
- Dumainy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Erlangga.
- Elfindri dan Nasri Bachtiar. 2004. *Ekonomi Ketenagakerjaan*. Padang: Andalas University Press.
- Gujarati, Damodar. 1999. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta : Erlangga
- Halim, Abdul. 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN.
- [Http://www.scribd.com/doc/35519665/Berkenalan-Dengan-Analisis-Jalur](http://www.scribd.com/doc/35519665/Berkenalan-Dengan-Analisis-Jalur). Diakses tanggal 25 Maret , 22:15 Wib.
- Irianty, Nanny. 2008. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Adaptivitas Tenaga Penjualan dalam Meningkatkan Kinerja Tenaga Penjualan pada PT. BPR Bringin Dana Sejahtera di Jakarta*. Semarang : Universitas Diponegoro.

- Kaloh, J. 2002. *Mencari bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Keraf, Gorys. 1994. *Komposisi: Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*. Flores: Nusa Indah.
- Khusaini, Muhamad. 2006. *Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. Malang: BPFE Unbraw.
- KPPOD. 2009. *Sewindu Otonomi Daerah: Perspektif Ekonomi*. Jakarta: KPPOD.
- Kuncoro, Mudrajad,. 2003. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan Edisi Ketiga*. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Laddin, Nurjanna. 2008. *Analisa Kemandirian Fiskal di Era Otonomi daerah (Studi Kasus Provinsi Sulawesi Tengah)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Litvack, Jenie.1999. *Decentralization*. Washington DC: World Bank.
- Mai, Umar Muhamad. 2010. *Dampak Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan dalam Kajian Perilaku Oportunistik Manajerial dan Struktur Corporate Governance Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Go Public di Pasar Modal Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Oates, W.1993. "Fiscal Decentralization and Economic Development," *National Tax Journal*, XLVI, 237-243.
- Parhah, Siti. 2011. "Kontribusi Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia".<http://file.upi.edu/direktori/1%20%20fpeb/prodi.%20ekonomi%20dan%20koperasi/siti%20parhah/kontribusi%20desentralisasi%20fiskal%20terhadap%20pertumbuhan%20ekonom.pdf>. Diakses tanggal 23 Maret.
- Pheni Chalid. 2005. *Keuangan Daerah, Investasi, dan Desentralisasi*. Jakarta:Kemitraan.
- Pigou, A.C M.A. 1960. *The Economic of Welfare. Fourth Edition*. London; Mac Millan & CO LTD.
- Prud'homme, Remy. 1995. "On the Danger of Decentralization," *Policy Research Working Paper* (Washington D.C: The World Bank), hal 1252.
- Ramahdani, Lili. 2009. *Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat*. Fakultas Ekonomi Universitas Andalas,.

- Ramhani, Asa. 2009. *Analisa Adopsi Teknologi Komputer dengan Pendekatan Structural Equation Modeling (Studi Empiris pada Asisten Dosen Universitas Indonesia)*. Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia.
- Santoso, Singgih. *Structural Equation Modeling (SEM) Konsep dan Aplikasi dengan AMOS 18*. Penerbit: Elex Media Komputindo.
- Sasana, Hadi. 2009. “ Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah,”. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 10, No.1, Juni 2009, hal. 103 – 124*.
- Saraswati, Sylvia. 2010. *Cara Mudah Menyusun Proposal, Skripsi, Tesis, Disertasi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Simanjuntak, Payaman.1985. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: LPFE-Universitas Indonesia.
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah Edisi Pertama*. Yogyakarta: Andi.
- Syaukarni HR, Alffan Gaffar Dan Ryaas Rasyid. 2004. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sofyardi. 2005. *Pengantar Ekonometrik*. Padang : Program Studi Ekonomi Pembangunan FE-UNAND.
- Tambunan, Tulus T.H, Dr. 2001. *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Todaro, Michael P. dan Smith Stephen C. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi Kedelapan*. Jakarta: Erlangga,.
- UNDP. *Human Development Report*. 1994. New York: Oxford University PressYork: the McGraw-Hill Companies.
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004 *tentang Pemerintah Daerah*
- Undang-Undang No.33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah*
- UNSFIRS. *Indonesia: the National Human Development Report, 2000*. Jakarta: United Nations Support Facility for Indonesia Recovery (UNSFIRS) and UNDP, 2000.
- Whithaker, William H. and Ronald C. Frederico. 1997. *Social welfare in Today's World. Second Edition*. New York: the McGraw-Hill Companies.

- Yafiz, M. “Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Perspektif Propinsi Riau),”
Makalah dalam Seminar Nasional. Yogyakarta: ISEI, 20 – 21 Maret 1999
- Zhang Tao *and* Zou Heng-Fu. “Fiscal Decentralization, Public Spending and Economic Growth in China, “ *Journal of Public Economics*, 1998, hal. 67, 221-240.
- Zulyanto, Aan. 2010. *Thesis: Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu*. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.